

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN :
STUDI REVITALISASI ALUN-ALUN KABUPATEN GRESIK

Oleh : Wahyu Indra Irsyadur Rosyidi*

ABSTRAK

Alun-alun Kabupaten Gresik merupakan salah satu alun-alun yang di revitalisasi di pulau Jawa. Proyek revitalisasi alun-alun Kabupaten Gresik diharapkan berdampak baik kepada masyarakatnya. Perubahan yang terjadi pada alun-alun Kabupaten Gresik merupakan bagian dari proses suatu perkembangan kota, di mana suatu kota selalu dituntut untuk mengalami perubahan dan perkembangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala yang terjadi pada saat implementasi kebijakan revitalisasi alun-alun Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada saat implementasi kebijakan revitalisasi alun-alun mengalami kendala dengan mengalami penolakan-penolakan dari masyarakat dari pedagang kaki lima, mahasiswa, tokoh budayawan dan LSM. Akan tetapi, proyek revitalisasi alun-alun berjalan dengan baik dan sesuai dengan sudah direncanakan dalam RPMJD Kabupaten Gresik, dan ditargetkan pada tahun 2019 sudah bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Gresik.

Kata Kunci : Alun-alun, Revitalisasi, Implementasi Kebijakan, Konteks Politik.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan rencana untuk dan membuat kebijakan untuk merevitalisasi alun-alun. Pemerintah membuat kebijakan untuk merevitalisasi alun-alun karena alun-alun sudah tidak sesuai dengan fungsi alun-alun yaitu sebagai tempat bermain masyarakat dan tempat berkumpulnya masyarakat, alun-alun sebelum dilakukan revitalisasi menjadi sentra pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima ini banyak yang berjualan di alun-alun Gresik, awalnya para pedagang kaki lima hanya

* Wahyu Indra Irsyadur Rosyidi. Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga.
iwahyu595@gmail.com.

berjualan mengelilingi alun-alun kemudian karena semakin banyaknya pengunjung menyebabkan para pedagang kaki lima juga semakin banyak sehingga luar alun-alun sudah tidak muat untuk dibuat berjualan akhirnya mereka masuk ke dalam alun-alun untuk berjualan ditengah alun-alun tersebut.

Implementasi kebijakan yaitu cara untuk mencapai suatu kebijakan, dalam pengimplementasian kebijakan terdapat dua pilihan langkah yang ada, yaitu pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, yang kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003 : 158). Implementasi kebijakan merupakan cara supaya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bisa tercapai dengan sesuai rencana, implementasi kebijakan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa langsung dilakukan dengan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah langsung dikerjakan sesuai dengan program tersebut atau implementasi bisa dilakukan dengan melalui formulasi kebijakan yang dirumuskan terlebih dahulu cara-cara untuk kebijakan bisa tercapai dengan sesuai rencana.

Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variasi tersebut yaitu komunikasi, yaitu komunikasi ini harus dilakukan dengan baik antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Karena ketika komunikasi ini terjalin dengan baik maka untuk tercapainya tujuan akan dapat dilakukan dengan mudah. Sumber daya, selain komunikasi yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dengan sesuai rencana dan dapat terlaksana dengan baik maka sumber daya ini juga menjadi penting baik sumber daya manusia atau sumber daya finansial, dari sumber daya manusia harus yang berkompetensi yang memiliki kemampuan yang bagus untuk sebagai pelaksana program supaya dapat dengan mudah untuk tercapainya sebuah kebijakan yang sudah dibuat, sumber daya finansial kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokrasi. Struktur birokrasi, bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan, karena struktur birokrasi ini yang akan membuat mekanisme implementasi program yang biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam program/kebijakan (Dwiyanto, 2009 : 31-32).

Implementasi kebijakan dalam arti luas bisa dikatakan bahwa implementasi kebijakan yaitu tahap proses kebijakan yang harus segera dilakukan setelah penetapan undang-undang, dan juga bisa dikatakan bahwa implementasi merupakan pelaksana undang-undang yang dilakukan oleh berbagai aktor, organisasi, untuk menjalankan kebijakan dalam meraih tujuan kebijakan tersebut. (Winarno, 2012 : 147). Sama halnya dengan penjelasan yang sudah penulis jelaskan di atas bahwa implementasi yaitu tahap dari kebijakan yang sudah dibuat untuk diselesaikan atau direalisasikan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait implementasi kebijakan, yang pertama yaitu implementasi kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (studi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang tanggap atau kurang merespon dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, kemudian dijelaskan bahwa tidak ada kejelasan terkait lembaga atau dinas mana yang akan mengatur dan menangani penataan dan pemberdayaan para pedagang kaki lima khususnya di Kecamatan Sidoarjo, kemudian terdapat juga dampak negatif dan dampak positif dari implementasi kebijakan tersebut (Ismanto. 2014).

Penelitian yang terkait kedua yaitu revitalisasi konsep alun-alun sebagai ruang publik (studi pemanfaatan alun-alun Ponorogo). Penelitian ini menjelaskan bahwa alun-alun menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat kelas menengah – bawah, karena dengan adanya alun-alun masyarakat bisa mengkuilatkan diri supaya segala bentuk kebutuhan psikologis manusia dapat terpenuhi (Hilman. 2015). Alun-alun menjadi penting buat masyarakat dari kelas menengah – bawah karena alun-alun adalah tempat bermain buat mereka yang secara gratis dan ketika di revitalisasi harus menjadi lebih baik akan tetapi tidak merubah yang gratis jadi berbayar.

Penelitian ketiga yaitu alun-alun Purwokerto : dari alun-alun ke open space. Penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi perubahan konsep dasar alun-alun Purwokerto dari alun-alun menjadi ruang terbuka/open space. Alun-alun Purwokerto ini sudah tidak menjadi ruang kosong yang memiliki makna sejarah dan spritual akan tetapi alun-alun Purwokerto ini menjadi ruang terbuka umum kota, dan itu semua akibat dari masyarakat yang sudah lebih modern, adapun proses renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Purwokerto terhadap alun-alun antara lain alun-alun ditinggikan, jalan di tengah alun-alun dihilangkan,

dan kedua bagian alun-alun (timur dan barat disatukan, sehingga ringin kurung di tengah alun-alun juga harus hilang karena ditebang. Kemudian ringin kurung tersebut digantikan dengan ringin kurung yang terbaru akan tetapi terbuat dari plastik (Widyandini. 2012).

Penelitian keempat yaitu alun-alun dan revitalisasi identitas kota Tuban. Penelitian ini menjelaskan bahwa sangat tepat untuk merevitalisasi alun-alun sebagai identitas kota karena alun-alun bisa dipakai sebagai simbol dalam kebangkitan kembali kota Tuban, revitalisasi alun-alun meliputi memperbaiki bangunan disekitar alun-alun secara sendiri-sendiri (seperti masjid, kantor Kabupaten dsb.nya) (Hartono. 2005).

Penelitian kelima yaitu dampak revitalisasi alun-alun Kota Malang dalam meningkatkan daya tarik wisata. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa dampak pada beberapa aspek ketika dilakukan revitalisasi alun-alun yaitu Pertama aspek religi, pada aspek ini alun-alun menjadi bermanfaat bagi jamaah Masjid Agung yang berada di alun-alun karena bisa digunakan untuk menampung jamaah yang tidak mendapat tempat di Masjid. Kedua aspek keamanan, pada aspek ini alun-alun menjadi aman karena setelah direvitalisasi alun-alun akan diberikan petugas keamanan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Ketiga aspek pendidikan, pada aspek ini alun-alun setelah direvitalisasi diberikan beberapa fasilitas oleh pemerintah yang mana fasilitas tersebut berupa perpustakaan yang bisa digunakan oleh anak-anak atau pelajar dan juga masyarakat. Keempat aspek sosial, alun-alun dibuatkan tempat untuk arena skateboard yang mana bisa digunakan oleh masyarakat. Kelima aspek ekonomi, pada aspek ini setelah alun-alun direvitalisasi alun-alun akan memberikan dampak sektor perekonomian karena masyarakat sekitar alun-alun dengan pihak terkait telah membuat lahan parkir untuk tempat parkir kendaraan wisatawan yang berkunjung di alun-alun. Keenam aspek budaya, pada aspek ini alun-alun setelah direvitalisasi akan menjadi tempat yang banyak dikunjungi masyarakat umum bukan hanya daerah malang saja akan tetapi banyak masyarakat luar kota yang berkunjung ke alun-alun sehingga menyebabkan pergeseran budaya dengan cara berpakaian wisatawan yang lebih modern (Mafalsa. 2016).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan menurut Merilee S, Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dan menurut Grindle untuk mengukur

keberhasilan dari suatu kebijakan bisa diukur dari proses pencapaian hasil akhir dari suatu tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Menurut Grindle suatu keberhasilan implementasi kebijakan yang terdiri dari Content of Policy yang terdiri dari kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakan, dan Context of Policy yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (Agustino, 2012 : 154).

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, dalam pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun ini terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi seperti kepentingan dari pedagang kaki lima yang tidak ingin alun-alun ini untuk direvitalisasi karena alun-alun sudah menjadi tempat atau lahan mereka untuk berjualan dan dengan berjualan di alun-alun pendapatan mereka lumayan banyak, para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun mereka bersama-sama menolak untuk kebijakan pemerintah terkait revitalisasi yang akan dilakukan di alun-alun tersebut, dan mereka juga menginginkan jika memang tetap dilakukan revitalisasi alun-alun mereka meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan mereka dengan memberikan tempat atau lahan untuk mereka berjualan yang di mana tempat atau lahan tersebut terdapat banyak kegiatan masyarakat atau padat penduduk sehingga pendapatan mereka tidak menurun dan minimal stabil untuk membiayai kehidupan mereka. Saat ini pemerintah Kabupaten Gresik sudah merelokasi para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun tersebut ke Jalan Notoprayitno, di mana jalan ini adalah jalan raya yang membungkan dari jalan utama menuju ke kawasan industri Gresik.

Kepentingan dari tokoh budayawan dan tokoh seniman yang menolak dengan adanya revitalisasi alun-alun ini karena revitalisasi alun-alun ini bukanlah konsep revitalisasi, akan tetapi revitalisasi ini adalah sebuah pembangunan alun-alun dari merubah konsep dari alun-alun itu sendiri yang mana merubah konsep alun-alun yaitu sebuah tanah lapang menjadi ada bangunan di alun-alun yang menurut para tokoh budayawan dan seniman ini sudah menyalahi konsep dasar alun-alun dan juga sudah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang sesuai pada Pasal 9 dan 10. Para tokoh budayawan dan seniman ini menolak adanya revitalisasi dan mempunyai kepentingan untuk mempertahankan alun-alun Kabupaten Gresik supaya tidak dilakukan revitalisasi, jika memang tetap dilakukan revitalisasi setidaknya hanya menghilangkan para pedagang kaki lima dan merelokasi ke

tempat yang lebih layak dan tidak ada bangunan di alun-alun yang bisa merubah konsep alun-alun.

Kepentingan dari pemerintah Kabupaten Gresik sendiri menginginkan untuk merevitalisasi alun-alun guna untuk menghilangkan para pedagang kaki lima dan merubah wajah alun-alun menjadi lebih modern dan menjadikan alun-alun sebagai pusat keagamaan Islam yang mana alun-alun nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat supaya fungsinya kembali ke masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik menginginkan alun-alun bersih dari para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun sehingga alun-alun terlihat bersih rapi dan tertata rapi dan yang paling penting jauh dari pedagang kaki lima, kemudian alun-alun bisa digunakan masyarakat untuk mengadakan acara di alun-alun bisa digunakan sebagai pentas seni, acara TPQ, bisa digunakan untuk olah raga jogging karena pemerintah Kabupaten Gresik juga membangun alun untuk digunakan untuk jogging.

Tipe manfaat dalam suatu kebijakan harus terdapat manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dalam kebijakan revitalisasi alun-alun Kabupaten Gresik memiliki manfaat yang berdampak positif untuk masyarakat, alun-alun direvitalisasi guna untuk menghilangkan para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun yang akan menjadikan alun-alun menjadi bersih dan tertata rapi jika sudah selesai dilakukan revitalisasi, kemudian alun-alun direvitalisasi manfaatnya untuk mengembalikan fungsi alun-alun kepada masyarakat supaya bisa digunakan sebagai tempat bermain dan berkumpulnya masyarakat atau bisa digunakan sebagai tempat kegiatan yang lainnya oleh masyarakat sehingga manfaat dari revitalisasi alun-alun ini sangat berdampak positif bagi masyarakat karena fungsinya akan dikembalikan kepada masyarakat yang selama ini diambil oleh para pedagang kaki lima sehingga masyarakat ketika bermain di alun-alun mereka tidak punya lahan untuk bermain.

Manfaat selanjutnya yaitu ketika alun-alun sudah direvitalisasi akan menjadi alun-alun yang lebih modern dan bersih, rapi, dan yang pasti jauh dari para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun, ditengah alun-alun akan dibuat bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pentas seni, bisa juga dibuat untuk pameran-pameran lalu bisa digunakan juga untuk anak-anak TPQ, dengan begitu revitalisasi alun-alun ini bermanfaat bagi masyarakat Gresik untuk dibuat kegiatan mereka, selain itu juga alun-alun juga bisa digunakan untuk upacara dan juga bisa digunakan untuk berjogging karena alun-alun akan

dbuatkan juga jalan lantai dua yang memutar alun-alun yang manfaatnya untuk dijadikan jogging oleh masyarakat, dengan begitu revitalisasi alun-alun ini akan dikembalikan kepada masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan mereka juga bisa bermain di alun-alun yang selama ini dikenal dengan tempat bermain yang secara gratis di kota.

Derajat perubahan yang ingin dicapai, setiap kebijakan pasti mempunyai target yang ingin dicapai dan juga seberapa besar perubahan yang ingin dicapai tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik menginginkan perubahan di alun-alun menjadi lebih baik dan alun-alun jauh dari pedagang kaki lima sehingga alun-alun tidak terlihat kumuh dan kotor kemudian perubahan yang hendak dicapai selain menjadikan alun-alun jadi lebih baik dan lebih modern yaitu mengembalikan fungsi alun-alun ini kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik yang ada di alun-alun.

Keinginan pemerintah Kabupaten Gresik untuk merevitalisasi alun-alun begitu besar karena sudah lama alun-alun Gresik ini dijadikan lahan oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan di alun-alun yang menyebabkan masyarakat tidak punya tempat bermain di alun – alun dan juga menyebabkan alun-alun ini menjadi terlihat tidak tertata dan menjadi kumuh dan kotor, apalagi pada hari minggu atau hari libur nasional yang mana biasanya banyak masyarakat untuk melakukan olah raga pagi hari di alun-alun harus di usir secara tidak langsung oleh para pedagang kaki lima karena para pedagang kaki lima ini dari pagi sampek malam berjualan di alun-alun ketika pada hari minggu atau pada hari libur, dari situlah kemudian Bupati Gresik mempunyai keinginan yang sangat besar untuk merevitalisasi alun-alun karena beliau melihat secara langsung alun-alun jika pada hari minggu dan pada hari libur nasional yang mana masyarakat tidak ada tempat untuk melakukan kegiatan olah raga di alun-alun karena saking banyaknya para pedagang kaki lima yang memenuhi alun-alun atau mereka banyak yang berjualan di tengah alun-alun.

Letak pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan revitalisasi alun-alun Kabupaten Gresik dibuat langsung dari Bupati Gresik yaitu Bapak Sambari, beliau sekarang menjadi Bupati Gresik adalah periode kedua dengan bekal pengalaman di periode pertama dan melihat langsung alun-alun seperti apa akhirnya beliau pada pemilihan Bupati tahun 2016 – 2021 beliau berjanji untuk merevitalisasi alun-alun dan mengembalikan fungsi alun-alun kepada masyarakat Gresik. Bupati Gresik langsung memberikan kebijakan untuk

merevitalisasi alun-alun yang kemudian ditindak lanjuti oleh dinas-dinas terkait seperti dinas pekerjaan umum yang selaku dinas yang mengimplementasikan kebijakan Bupati kemudian bapeda yang selaku badan pembuat perencanaan pembangunan daerah yang mengatur pembangunan di Gresik dan juga anggarannya.

Di sini peran Bupati sangat dibutuhkan karena dengan beliau membuat kebijakan untuk merevitalisasi alun-alun yang dengan harapan untuk mengembalikan fungsi alun-alun kepada masyarakat Gresik dan menjauhkan alun-alun dari pedagang kaki lima, sehingga alun-alun tidak terlihat kumuh dan kotor lagi, karena alun-alun ini adalah identitas kota di mana alun-alun letaknya di tengah-tengah kota atau sudah menjadi jantung kota, sehingga masyarakat dari luar daerah ketika pergi ke daerah lain yang dituju selain tempat wisata di daerah suatu daerah tersebut maka selanjutnya yang dituju adalah alun-alun, dengan begitu keputusan Bupati untuk merevitalisasi alun-alun dinilai sudah tepat karena selama ini alun-alun Kabupaten Gresik juga terlihat tidak terawat juga kumuh dan kotor karena banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun.

Pelaksana program, dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten. Dalam kebijakan revitalisasi alun-alun Kabupaten Gresik yang menjadi pelaksan program sudah pasti adalah dinas pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum bertugas untuk melakukan pengawasan dan yang mencari atau melakukan pelelangan perusahaan yang bisa mengerjakan proyek revitalisasi tersebut, dan dari dinas pekerjaan umum juga menugaskan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dalam pembangunan dan melakukan pengawasan untuk pengerjaan proyek revitalisasi alun-alun tersebut, tidak hanya dari dinas pekerjaan umum saja Bupati juga melakukan pengawasan langsung terkait proyek revitalisasi ini beliau juga terjun langsung untuk melihat pengerjaan revitalisasi tersebut.

Sumber-sumber daya yang digunakan, pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, sumber daya-sumber daya tersebut yaitu termasuk dalam pelaksana program yang harus berkompeten dan tidak hanya itu harus didukung dengan sumber daya yang berupa dana agar pelaksanaan kebijakan revitalisasi alun-alun ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Sumber daya dari pelaksana program yang harus berkompeten yang harus menguasai pembangunan sehingga bisa mengawasi jalannya proses pengerjaan proyek revitalisasi alun-alun tersebut. Kemudian sumber daya yang berupa dana untuk

merevitalisasi alun-alun ini diambil dan dianggarkan dari APBD yang mana revitalisasi alun-alun tersebut sudah masuk ke dalam RPJMD yang menjelaskan bahwa termasuk dalam pembangunan kawasan yang bernuansa religi.

Selanjutnya Context of Policy antara lain : Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi alun-alun yang memegang kekuasaan penuh untuk mengerjakan proyek revitalisasi alun-alun tersebut adalah dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas PU yang menghendaki pekerjaan ini yaitu dengan melakukan lelang proyek revitalisasi alun-alun tersebut, kemudian dari badan perencanaan pembangunan daerah yang selaku pembuat rencana untuk dilakukan revitalisasi alun-alun karena terdapat masalah di alun-alun yang harus segera diselesaikan.

Terdapat beberapa kepentingan yang ada dalam kebijakan revitalisasi alun-alun Kabupaten Gresik ini, yang pertama dari Dalam pembuatan kebijakan revitalisasi alun-alun ini terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi seperti kepentingan dari pedagang kaki lima yang tidak ingin alun-alun ini untuk direvitalisasi karena alun-alun sudah menjadi tempat atau lahan mereka untuk berjualan dan dengan berjualan di alun-alun pendapatan mereka lumayan banyak, para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun mereka bersama-sama menolak untuk kebijakan pemerintah terkait revitalisasi yang akan dilakukan di alun-alun tersebut, dan mereka juga menginginkan jika memang tetap dilakukan revitalisasi alun-alun mereka meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan mereka dengan memberikan tempat atau lahan untuk mereka berjualan yang di mana tempat atau lahan tersebut terdapat banyak kegiatan masyarakat atau padat penduduk sehingga pendapatan mereka tidak menurun dan minimal stabil untuk membiayai kehidupan mereka.

Yang kedua dari kepentingan dari tokoh budayawan dan tokoh seniman yang menolak dengan adanya revitalisasi alun-alun ini karena revitalisasi alun-alun ini bukanlah konsep revitalisasi, akan tetapi revitalisasi ini adalah sebuah pembangunan alun-alun dari merubah konsep dari alun-alun itu sendiri yang mana merubah konsep alun-alun yaitu sebuah tanah lapang menjadi ada bangunan di alun-alun yang menurut para tokoh budayawan dan seniman ini sudah menyalahi konsep dasar alun-alun dan juga sudah melanggar undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang sesuai pada pasal 9 dan 10. Para tokoh budayawan dan seniman ini menolak adanya revitalisasi dan mempunyai kepentingan untuk mempertahankan alun-alun Kabupaten Gresik supaya tidak dilakukan revitalisasi, jika

memang tetap dilakukan revitalisasi setidaknya hanya menghilangkan para pedagang kaki lima dan merelokasi ke tempat yang lebih layak dan tidak ada bangunan di alun-alun yang bisa merubah konsep alun-alun.

Yang ketiga dari kepentingan dari pemerintah Kabupaten Gresik sendiri menginginkan untuk merevitalisasi alun-alun guna untuk menghilangkan para pedagang kaki lima dan merubah wajah alun-alun menjadi lebih modern dan menjadikan alun-alun sebagai pusat keagamaan Islam yang mana alun-alun nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat supaya fungsinya kembali ke masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik menginginkan alun-alun bersih dari para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun sehingga alun-alun terlihat bersih rapi dan tertata rapi dan yang paling penting jauh dari pedagang kaki lima, kemudian alun-alun bisa digunakan masyarakat untuk mengadakan acara di alun-alun bisa digunakan sebagai pentas seni, acara TPQ, bisa digunakan untuk olah raga jogging karena pemerintah Kabupaten Gresik juga membangun alun untuk digunakan untuk jogging.

Strategi aktor yang terlibat yaitu untuk terwujudnya revitalisasi alun-alun menjadi modern dan bernuansa religi yaitu dengan cara memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat yang positif bagi masyarakat luas agar tidak memberikan stigma dan citra yang buruk kepada revitalisasi alun-alun. Aktivitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah baik kepada para pedagang kaki lima, komunitas yang ada di Gresik, mahasiswa, tokoh agama, tokoh sejarawan dan masyarakat sekitar, dilaksanakan secara berulang-ulang dan bertahap hingga dirasa proses penyampaian informasi dirasa telah berhasil dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memberikan pemahaman dari masing-masing pihak.

Karakteristik lembaga, lingkungan dalam kebijakan revitalisasi alun-alun juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, memang pada awalnya lingkungan disekitar alun-alun atau masyarakat disekitar alun-alun tidak ada yang menolak dan setuju untuk alun-alun direvitalisasi akan tetapi tidak semua yang setuju dan satu sura kalau alun-alun akan di revitalisasi, kemudian pada tahap implementasi kebijakan revitalisasi alun-alun masyarakat menolak dan melakukan demo di alun-alun supaya revitalisasi alun-alun tidak dilanjutkan. Akan tetapi, dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait revitalisasi tersebut masyarakat sedikit demi sedikit mulai setuju dan mendukung proyek revitalisasi alun-alun, dengan begitu lingkungan atau masyarakat disekitar alun-alun mendukung proyek revitalisasi

tersebut. Selain itu karakteristik dari suatu lembaga juga turut mempengaruhi suatu kebijakan, karakteristik dari lembaga atau pemerintah juga turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan revitalisasi alun-alun, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka bisa kooperatif dalam kebijakan revitalisasi alun-alun.

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, yang terakhir dan juga dirasa penting yaitu kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Untuk tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana dari dinas pekerjaan umum sendiri selaku sebagai pelaksana kebijakan revitalisasi alun-alun yang bertugas untuk mengawasi proyek revitalisasi dan yang memegang penuh proyek revitalisasi alun-alun tersebut harus patuh terhadap pembuat kebijakan atau pengambil keputusan yaitu Bupati, selama proses implementasi dinas pekerjaan umum menjalankan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh pembuat keputusan.

Respon dari dinas pekerjaan umum selaku pelaksana proyek revitalisasi alun-alun juga sangat baik dengan adanya demo yang dilakukan oleh masyarakat yang menolak kebijakan revitalisasi alun-alun dengan mewakili pemerintah dinas pekerjaan umum melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang melakukan demo untuk dengar pendapat dan juga sekaligus untuk mensosialisasikan kebijakan revitalisasi alun-alun yang akan dirubah menjadi lebih modern dan akan dijadikan alun-alun sebagai kawasan religi atau alun-alun yang bernuansa religi dan menjadi pusat keagamaan Islam. Memang membutuhkan waktu untuk memberikan pengetahuan wawasan terkait kebijakan revitalisasi alun-alun tersebut kepada masyarakat yang menolak kebijakan revitalisasi alun-alun itu, akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka mendukung dan juga mendapatkan masukan-masukan terkait revitalisasi alun-alun tersebut.

Untuk saat ini proyek revitalisasi alun-alun masih dalam tahap pengerjaan, tetapi pengerjaan finishing atau tahap akhir saja dan pada tahun 2019 ditargetkan akan rampun semua proyek revitalisasi alun-alun Kabupaten Gresik sehingga pada tahun 2019 sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik di alun-alun.

KESIMPULAN

Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa revitalisasi alun-alun Gresik dari tanah lapang menjadi pusat keagamaan Islam ini terdapat kendala yaitu penolakan-penolakan dari masyarakat yang menolak karena alun-alun merupakan cagar budaya, kemudian mengalami penolakan dari para pedagang kaki lima yang menolak dengan adanya proyek revitalisasi ini karena lahan mereka untuk berjualan telah diambil oleh pemerintah. Alun-alun Gresik sekarang bukanlah sebuah lahan kosong yang bermakna historis dan kesakralan tetapi telah menjadi pusat keagamaan Islam yang juga bisa digunakan sebagai tempat kegiatan yang lainnya.

Pemerintah Kabupaten Gresik harus lebih transparan lagi dalam melakukan perumusan kebijakan apalagi terkait dalam pembangunan karena pembangunan menggunakan uang rakyat, dan pembangunan tersebut akan kembali kepada masyarakat yang harus bermanfaat untuk masyarakat, masyarakat juga mempunyai hak untuk ikut dalam pengawasan pembangunan dan masyarakat juga berhak untuk mengetahui biaya anggaran dan juga rincian anggaran yang dibuat untuk pembangunan tersebut, dengan begitu masyarakat tidak akan menaruh kecurigaan kepada pemerintah dan masyarakat juga bisa percaya kepada pemerintah akan tetapi pemerintah juga harus terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak hanya mendengarkan harus juga ada solusi yang diberikan oleh pemerintah.

Kemudian terkait sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang meluas karena hanya melakukan rapat atau musawarah terhadap perwakilan dari tokoh-tokoh yang berpengaruh di Gresik, tidak melibatkan masyarakat yang juga punya hak suara untuk menyuarakan aspirasi mereka, dan pada awal pembangunan proyek revitalisasi alun-alun ini tidak ada sosialisasi dari pemerintah yang berupa spanduk atau papan reklame, ketika pemerintah sudah melakukan pembangunan proyek revitalisasi tersebut barulah masyarakat melakukan aksi atau berdemo karena mereka tidak mengetahui bahwa alun-alun akan dilakukan revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan keterlambatan pemerintah melakukan sosialisasi dan tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah salah paham antara pemerintah dengan masyarakat.

Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pemerintah Kabupaten Gresik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bermusyawarah untuk pembangunan cagar budaya, lebih terbuka terhadap masukan-masukan atau saran-saran yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Alun-alun merupakan tempat bersejarah kuno yang berada di sebuah kota dan alun-alun juga menjadi pusat kota atau jantung kota sehingga pemabngan dalam alun-alun harus di musyawarahkan dengan jelas dan biak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Hartono, Samuel. 2005. *Alun-alun dan Revitalisasi Identitas Kota Tuban*. Jurnal Teknik Arsitektur. Vol.33, No.1. Hal 131-142.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ismanto. Hadi. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. ISSN.2338-445X). Vol.2, No.1.
- Mafalsa, Ahmad. 2016. *Analisis Dampak Revitalisasi Alun-alun Kota Malang dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.37, No.1. Hal 15.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : pt Elex Media Komputindo.
- Widyandini, Wita. 2015. *Alun-Alun Purwokerto : Dari Halun-Halun ke Open Space*. Vol.13, No.1. Hal 68-76.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.